

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MA'LELEANG**  
**(Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten**  
**Bulukumba)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.HI.) Jurusan Peradilan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ARNI

NIM. 10100112078

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arni  
NIM : 10100112078  
Tempat/Tgl. Lahir : Jojjolo, 02 Januari 1994  
Jur/Prodi : Peradilan/ Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/ S1  
Alamat : Samata  
Judul : Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang* (Studi Kasus di  
Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Februari 2016

Penyusun,

**ARNI**  
**NIM: 10100112078**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma’leleang* (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)”, yang disusun oleh Arni, NIM:10100112078, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 29 Februari 2016 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Februari 2016 M.

20 Jumadil Awal 1437 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, Syamsuddin M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr.H.Muh.Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Zulfahmi, M.Ag, Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Irfan, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dra.Hj.Hartini Tahir, M.Hi. (.....)

Pembimbing II : Dr.Abdillah Mustari, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, Syamsuddin M.Ag.  
NIP.19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt. Rab yang Maha Pengasih tapi tidak pilih kasih, Maha Penyayang yang tidak pilih sayang penggerak yang tidak bergerak, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi, penulis tak pernah menyerah karena penulis yakin ada Allah Swt. yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak.. yang telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MA’LELEANG (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)**. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Mustaming** dan Ibunda **Geno** tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara kandung Dahlan, Syamsuddin, dan Ardi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawan.

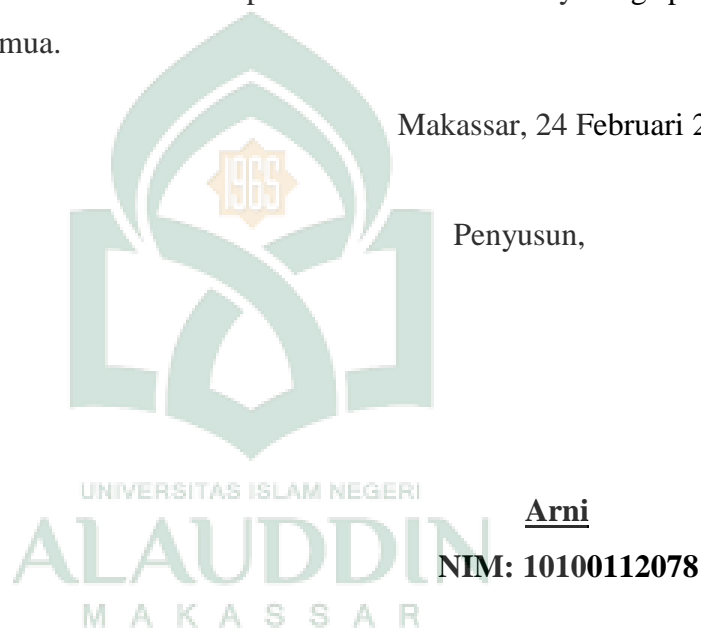
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal saleh mereka.
4. Bapak Dr. Supardin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama dan Dra. Fatimah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, dan seluruh staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menempuh kegiatan akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. H. Hartini Tahir, M.Hi. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku Pembimbing II, Bapak Zulfahmi Alwi, M.Ag.,P.h.D.Selaku Penguji I, Bapak Irfan, S.Ag.M.Ag. selaku Penguji II yang dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai - pegawai tata usaha Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh stafnya dan karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh elemen Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan dan menyediakan sumber dan membantu memberikan keterangan yang menunjang penyelesaian skripsi ini guna penyelesaiannya.

9. Serta kepada teman-teman Jurusan Peradilan Agama, sahabat, adik-adik yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini, mohon di maafkan. Dan atas bantuan, dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kalian di ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikiakan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Makassar, 24 Februari 2016

Penyusun,



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-ix
DAFTAR TABEL .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-11
A. Latar Belakang Masalah .....	1-6
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10-11
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	12-40
A. Pengertian Hukum Waris Islam .....	12
B. Dasar Hukum Waris Islam .....	13-25
C. Syarat-Syarat dan Rukun Untuk Memperoleh Harta warisan dalam Hukum Islam .....	25
D. Sebab-sebab dan Halangan Mewaris.....	28-33

E. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	33-35
F. Ahli Waris dan Bagia-Bagiannya.....	35-40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41-46</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	42-44
D. Metode Pengumpulan Data .....	44-45
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
<b>BAB IV PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN <i>MA'LELEANG</i> DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>48-65</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Ballasaraja .....	48
1. Kondisi Geografis .....	48
2. Kondisi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan .....	49-53
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan <i>Ma'leleang</i> di Kelurahan Ballasaraja.....	55-61
C. Faktor-Faktor dalam Pelaksanaan Waris <i>Ma'leleang</i> .....	661
D. Nilai-Nilai dalam Pelaksanaan Waris <i>Maleleang</i> .....	64-66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67-68</b>
A. Kesimpulan .....	67



B. Implikasi Penelitian .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69-70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Pemerintahan .....	48
Tabel 2. Sarana Umum di Kelurahan Ballasaraja .....	49
Tabel 3. Data Waris <i>Ma'leleang</i> .....	57



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	žal	zet (dengan titik di bawah)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	šad	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍad	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭa	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	wi
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

## ABSTRAK

NAMA : ARNI  
NIM : 10100112078  
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN *MA'LELEANG*  
(studi kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba).

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimanakah Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang* (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)?

Adapun sub masalahnya dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Praktek pembagian harta warisan secara *Ma'leleang* di Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?, 2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembagian harta warisan *Ma'leleang* pada masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis formal dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial kultur yang ada di desa tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pemerintah setempat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pihak yang melaksanakan pembagian harta warisan *ma'leleang*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dan teknik pengumpulan datanya adalah *interview*. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang melakukan pembagian warisan *ma'leleang*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara *ma'leleang* hanya manfaatnya saja yang dapat diambil dari harta tersebut (tanah sawah). Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan *ma'leleang* yaitu karena terbatasnya lahan yang dimiliki pewaris semasa hidupnya. Pembagian harta tersebut sesuai dengan kesepakatan masing-masing ahli waris.

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian harta warisan *ma'leleang* di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam pembagian tersebut ada unsur kesepakatan didalamnya antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Tidak bisa dipungkiri, masalah kewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia. Kewarisan bisa timbul karena adanya tiga hal. Pertama adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris, Kedua, adanya harta peninggalan, yang merupakan harta kekayaan si pewaris. Dan yang ketiga, adanya orang yang menerima harta warisan, yang disebut dengan ahli waris. Adanya pewarisan berarti adanya perpindahan hak, berupa harta benda dari si pewaris kepada ahli waris.

Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian- bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 356

ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.<sup>2</sup>

Masalah Warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta bendadan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan. Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian warisan dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan permasalahan yang memungkinkan terjadinya keretakan tali persaudaraan. Untuk mencari jalan penyelesaian mengenai masalah harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya. Adapun pembagian masing-masing

---

<sup>2</sup> Akhmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT.Grafindo, 1998), hlm.355.

ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an, yang secara eksplisit termuat dalam Qs.An-Nisa /4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapakdan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".<sup>3</sup>

Sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang-orang Jahiliah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus untuk datang menghadap Rasulullah saw guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah saw bersabda: "Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat". Rasulullah saw bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat ke 7

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h.101.

dan 8 sebagai cara membagikan warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris. (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam Kita Faraidl dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas).<sup>4</sup>

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa /4:11:

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

Terjemahnya

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan".

Sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang-orang Jahiliah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus untuk datang menghadap Rasulullah saw guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah saw bersabda: "Aku belum tahu apa yang harus

---

<sup>4</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 209.



aku perbuat”. Rasulullah saw bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat ke 7 dan 8 sebagai cara membagikan warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris. (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam Kita Faraidl dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas).<sup>5</sup>

Yaitu semuanya sama dalam hukum Allah swt. mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah swt. bagi masing-masing dari mereka sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan al-wal . Karena sesungguhnya hubungan wal itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab.

Dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup. Sistem kewarisan Individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris mewarisi secara perorangan. Kolektif, yaitu sistem yang menentukan para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, yang mana terdapat mayorat laki-laki dan mayorat perempuan,

---

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 209.

yaitu apabila keturunan laki-laki atau perempuan yang tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.

Pola penguasaan tanah warisan dengan cara *ma'leang* (bergiliran) yang terdapat di Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya berkaitan erat dengan sistem kewarisan. Dalam sistem kewarisan masyarakat di kabupaten Bulukumba, demikian juga perlakuan pada harta peninggalan. Ada bagian yang bisa langsung dibagi diantara ahli waris misalnya tanah kebun akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, akan tetapi seperti tanah sawah yang hanya satu petak dan ahli warisnya lebih dari 1 orang. Ketika akan dibagi dikhawatirkan terjadi perselisihan dikemudian hari. Apabila ahli waris sepakat akan dilakukan pembagian warisan dengan cara *ma'leang* agar supaya mendapat rasa keadilan diantara ahli waris baik itu mereka yang laki-laki maupun perempuan, ketika mereka bersepakat melakukan pembagian tersebut.

Pemakaian tanah waris diatur secara bergiliran antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain dari satu musim ke musim panen berikutnya, dan berlangsung terus menerus. Pada sistem gilir yang sifatnya sederhana, perputaran gilir ini berjalan pada lapisan pertama dari keturunan sesudah si pewaris. Bila lapisannya semakin bertambah dan orang yang berhak mendapatkan gilirannya semakin banyak, maka pengaturan gilir ini menjadi semakin rumit. Dalam kondisi ini penentuan hak gilir ini harus dilakukan melalui rapat/musyawarah untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan pihak lain.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan, dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris.

Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Kemudian masyarakat sebagian berpendapat bahwa ketika warisan itu dibagi dengan cara adil baik itu dengan pembagiannya secara *ma'leleang* itu terjadi ketika ada kesepakatan, karena itu merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa adil kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Maka kehidupan mereka terasa damai dan tentram tanpa ada perselisihan, dan tali persaudaraan diantara mereka semakin erat.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang* (studi kasus di Kec.Bulukumpa, Kab. Bulukumba).

Sistem pembagian harta warisan *ma'leleang* merupakan suatu cara yang dilakukan masyarakat untuk membagi harta warisannya dengan cara beragiliran. Harta warisan yang dijadikan objek *ma'leleang* yaitu harta yang ditinggal mati oleh pewaris, harta tersebut tidak langsung di bagi secara *ma'leleang* ketika istri (janda) belum meninggal. Harta tersebut masi kekuasaan penuh istri (janda), warisan *ma'leleang* mulai dilakukan ketika janda tersebut meninggal dunia. Karena

dihawatirkan harta tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Ahli waris dan tidak lagi membaginya kepada ahli waris yang lain istri (janda)

## 2. Deskripsi Fokus

Pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat praktek pembagian harta warisan dengan cara *ma'leleang* yang mana pembagian harta warisan itu berupa sawah yang digilir dari musim panen ke musim panen selanjutnya. Ini merupakan tradisi yang dilakukan di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa yang turun temurun dilakukan dari nenek moyang sampai sekarang. Yang menganggap bahwa salah satu cara untuk membagi harta warisan yaitu dengan cara *ma'leleang*. Pembagian harta warisan ini salah satunya untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak ahli waris karena objek harta yang akan dibagi tidak cukup untuk dibagikan kepada para ahli waris, mereka berinisiatif untuk membaginya dengan sistem bergilir dan kemudian manfaatnya saja yang diambil dari sawah tersebut.

## C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka pokok masalah yang timbul adalah Bagaimanakah Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang* (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)?

Adapun sub masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Praktek pembagian harta warisan secara *Ma'leleang* di Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa?

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum islam Terhadap pembagian harta warisan *Ma'leang* pada masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

#### **D. Kajian Pustaka**

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang sistem pembagian harta warisan *ma'leang* di kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus pada pokok kajian penulis, maka penulis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan *Ma'leang* (Studi Kasus di kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam karya ilmiah, maka disini penulis sangat berkesan hati akan penelitian yang terkait hal tersebut.

Adapun yang menjadi beberapa rujukan antara lain:

1. Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, dalam buku ini memberikan gambaran bahwa hukum kewarisan, yang disebut dengan *fara'id* (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya. Dalam penerapannya, ketentuan baku dalam menjadi pedoman untuk menentukan proporsional penyelesaian pembagian warisan.
2. Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dalam buku ini membahas mengenai gambaran bahwa dalam hukum kewarisan Islam di

Indonesia ada sebab untuk memperoleh harta warisan dan juga terdapat halangan untuk memperolehnya.

3. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, dalam buku ini membahas mengenai transendensi keadilan dalam Hukum kewarisan Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan, baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantive antara pesan hukum dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum.

4. Abdillah Mustari dalam bukunya, *Hukum Kewarisan Islam*, dalam buku ini memberikan gambaran mengenai harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Karena pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.

5. Hilman Hadikusumah dalam bukunya, *Hukum Waris Adat*, dalam buku ini memberikan gambaran bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai dari pada sifat-sifat kebendaan mementingkan diri sendiri.

Selain dari buku diatas penulis juga mempersiapkan buku-buku lain yang membahas masalah waris sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi

yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma’leleang* (studi kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”. Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam karya ilmiah, maka disini penulis sangat berkesan hati untuk mengadakan penelitian yang berjudul Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma’leleang*.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan dengan cara *ma’leleang* Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap pembagian harta warisan dengan cara *Ma’leleang* pada masyarakat di kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

##### **2. Kegunaan**

- a. Kegunaan Ilmiah

Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan pembagian harta warisan secara *ma’leleang* .

- b. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bagi masyarakat demi terwujudnya pemahaman hukum Islam terkait dengan pembagian harta warisan secara *ma’leleang*.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

Waris merupakan hal yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan masyarakat terutama bagi orang yang di tinggal mati dan meninggalkan harta warisan. Dalam pelaksanaan warisan sangat ditekankan oleh agama Islam agar mendapatkan rasa keadilan bagi ahli warisnya dan pembagian warisan dapat terlaksana dengan baik.

Untuk memahami warisan *ma'leleang* dari berbagai aspeknya dapat dilihat pada pengertian sebagai berikut:

#### **A. Pengertian Hukum Waris**

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.<sup>1</sup>

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 355.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.479.



Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>3</sup>

Yang dinamakan harta peninggalan adalah harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan adalah harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan kepemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terahir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.

### **B. Dasar Hukum Waris Islam**

Adapun dasar hukum tentang waris Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, Ijma', Ijtihad diantaranya adalah:

a. QS. An-Nisa/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

<sup>3</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 375.

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>4</sup>

Sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang-orang Jahiliah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus untuk datang menghadap Rasulullah saw guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah saw bersabda: “Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah saw bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat ke 7 dan 8 sebagai cara membagikan warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopannya membagikan hak waris. (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam Kita Faraidl dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h.101.

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 209.

Yaitu semuanya sama dalam hukum Allah swt. mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah swt. bagi masing-masing dari mereka sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan al-wal . Karena sesungguhnya hubungan wal itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab.

b. Qs. An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>

Pada suatu waktu Rasulullah saw yang disertai Abu Bakar Shiddik datang menziarahi Jabir bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit keras di kampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah saw dan Abu Bakar datang, Jabir bin Abdillah sedang dalam keadaan yang tidak sadar. Kemudian Rasulullah saw segera mengambil air wudhu dan meneteskan beberapa tetes air wudhu tersebut ke atas tubuh Jabir bin Abdillah, sehingga dia sadar. Kemudian setelah sadar Jabir berkata: “Wahai Rasulullah, apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta kekayaan?”. Sehubungan dengan pertanyaan Jabir bin Abdillah itu Allah swt menurunkan ayat ke 11-14 yang dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam. (HR. Enam orang Imam Hadis dari Jabir bin Abdillah).<sup>7</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslim untuk berlaku adil saat pembagian harta warisan. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah menjadikan semua harta warisan hanya untuk ahli waris perempuan tidak mendapat apapun. Adil buan berarti sama. Dalam Islam, bagian laki-laki dan perempuan Allah bedakan. Allah menjadikan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal ini disebabkan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h.101.

<sup>7</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 212.

menanggung semua hal yang berat. Maka sangatlah sesuai apabila ia diberi dua kali lipat daripada yang diterima perempuan.<sup>8</sup>

c. QS an-Nisaa/4:12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُشُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang

<sup>8</sup> Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014), h. 155.

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>9</sup>

Pada suatu waktu istri Sa'ad bin Rabi' datang menghadap kepada Rasulullah saw untuk mengadukan suatu masalah. Ketika dia berkata: “Wahai Rasulullah, dua orang putrid ini adalah anak Rabi' yang telah mengikuti peperangan bersama engkau dan gugur di medan Uhud. Sepeninggal Rabi', paman kedua orang anak ini telah mengambil seluruh harta kekayaan peninggalannya. Sedangkan dua orang anak ini akan sulit mendapatkan jodoh kalau tidak memiliki harta kekayaan”. Sehubungan dengan pertanyaan itu Rasulullah saw bersabda: “Allah swt akan memberikan keputusan hukum dalam masalah ini”. Sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat 11-14 yang menegaskan tentang hukum warisan dalam Islam, sehingga dengan demikian di kalangan kaum muslimin tidak akan terjadi sengketa. Selain itu diturunkannya ayat-ayat ini sebagai penghapus hukum yang berlaku di zaman Jahiliah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim dari Jubir bin Abdillah).<sup>10</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah merincikan pembagian harta waris yaitu dengan ketentuan: untuk bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, hal ini apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk bagian anak perempuan tidak akan menghabiskan harta warisan. Tetapi apabila anak laki-laki itu sendirian maka ia mendapatkan semua harta warisan,

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h. 102.

<sup>10</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 212-213.

dan apabila ia bersama satu orang saudara laki-laki atau lebih, maka harta warisan dibagi secara merata kepada mereka, baik berdua atau lebih. Apabila si mayit meninggalkan kedua orang tua dan suami atau isteri, maka bagian suami setengah dan bagian isteri seperempat, sedangkan sisanya untuk kedua orangtuanya yaitu sepertiga untuk ibunya dan sisanya untuk ayahnya semua. Adapun untuk wasiat dianjurkan lebih didahulukan daripada utang dalam penuturannya.<sup>11</sup>

Pada suatu waktu istri Sa'ad bin Rabi' datang menghadap kepada Rasulullah saw untuk mengadukan suatu masalah. Ketika dia berkata: "Wahai Rasulullah, dua orang putrid ini adalah anak Rabi' yang telah mengikuti peperangan bersama engkau dan gugur di medan Uhud. Sepeninggal Rabi', paman kedua orang anak ini telah mengambil seluruh harta kekayaan peninggalannya. Sedangkan dua orang anak ini akan sulit mendapatkan jodoh kalau tidak memiliki harta kekayaan". Sehubungan dengan pertanyaan itu Rasulullah saw bersabda: "Allah swt akan memberikan keputusan hukum dalam masalah ini". Sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat 11-14 yang menegaskan tentang hukum warisan dalam Islam, sehingga dengan demikian di kalangan kaum muslimin tidak akan terjadi sengketa. Selain itu diturunkannya ayat-ayat ini sebagai penghapus hukum yang berlaku di zaman Jahiliyah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim dari Jubir bin Abdillah).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014), h. 155.

<sup>12</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 212-213.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bagian-bagian waris suami dan isteri (jika salah satunya meninggal) serta bagian ahli waris yang mempunyai hubungan dengan si mayit. Suami mendapat seperdua, jika tidak punya anak. Jika punya anak ia mendapat seperempat. Hal ini setelah dipenuhi wasiat atau utangnya. Adapun isteri mendapat seperempat harta jika tidak punya anak. Jika punya anak, ia mendapat seperdelapan. Hal ini setelah dipenuhi wasiat dan utang. Selanjutnya, jika seseorang meninggal, dan tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi punya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, masing-masing saudara itu mendapat seperenam. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari satu, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Demikianlah ketentuan Allah.

13

d. QS an-Nisaa/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan. Maka

<sup>13</sup> Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014), h. 157.



bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Jabir menuturkan, Rasulullah datang ke rumahnya ketika dia sedang sakit.

Lalu dia berkata kepada beliau, “Rasulullah, aku mewasiatkan sepertiga hartaku bagi saudara-saudara perempuanku”. Beliau menanggapi, “Itu sangat baik”. Dia berkata lagi, “Bagaimana dengan separuh hartaku?” Beliau menjawab, “Itu juga sangat baik”. Setelah itu, beliau keluar, namun tidak lama kemudian masuk lagi menemuinya seraya bersabda, “Aku mempunyai firasat bahwa kamu tidak akan mati dalam sakitmu kali ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku, menjelaskan tentang bagian saudara-saudara perempuanmu, yaitu sebanyak duapertiga”. Sejak itu, Jabir sering mengatakan bahwa ayat 176 terkait dengan dirinya. (HR. An-Nasa’i)<sup>14</sup>

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah mengungkapkan bahwa orang-orang meminta fatwa kepada Nabi tentang kalalah, seperti halnya Jabir bin Abdullah; dia tidak punya bapak lagi, juga tidak punya anak. Yang ada hanya saudara-saudara perempuan yang asalnya se-‘asabah dengan dia. Sebelum kasus ini, ketentuan tentangnya belum ada sedikitpun. Yang ada bagiannya dari saudara laki-laki seibu, yaitu seperenam kalau sendirian, dan sepertiga kalau lebih dari seorang.

---

<sup>14</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 289.

Mereka berserikat dalam sepertiga meskipun jumlah mereka banyak. Karena sepertiga itu sebenarnya warisan ibu mereka, yang hanya itulah bagiannya, tidak ada yang lain. Ayat ini menjawab permintaan mereka.<sup>15</sup>

## 2. As-Sunnah

Sumber kedua dari hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau Hadits

- 1) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَرَكْتُ اللَّهُ تَرَكْتُ الْفَرَائِضَ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furuudh*) sesuai dengan ketentuan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*‘ashabah*)”.<sup>16</sup>

Hadits tersebut, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an.

2. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Huzail bin Syurahbil r.a. yang menyebutkan:

...سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلْابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَآخِرُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ

<sup>15</sup> Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014), h. 211.

<sup>16</sup> Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadits Sahih Muslim*, Jilid. 3 (Cet. III; Jakarta: Widjaya, 1993), h. 194-195.

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَعمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ  
لِسُدُسِ تَكْمَلَةِ الثُّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلَا أُخْتُ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ وَلَا بِنَةَ ابْنِ  
أَبْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

Artinya:

“...Ditanyakan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka seorang anak perempuan, pembagian anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: untuk anak perempuan seperdua. Pergilah (bertanya) kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat saya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya: Kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah saw. yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan. Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas’ud. Lalu dia berkata: janganlah kamu bertanya kepada saya selama orang alim (Ibnu Mas’ud) ini masih berada di antara kamu”.<sup>17</sup>

Hadits ini, menjelaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Qur’an, seperti bagian anak perempuan adalah seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam berupa penyempurnaan dua pertiga, dan sisanya itu untuk saudara perempuan.

- 2) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah Bin Zaid r.a. yang menyebutkan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya:

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq ‘alaih)”.

<sup>17</sup> H. Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadits Sahih Bukhari*, Jilid. 4 (Cet. V; Jakarta: Widjaya, 1992), h. 90-91.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa antara orang yang menganut agama Islam dan penganut agama selain Islam adalah tidak saling mewarisi, jadi penganut Islam tidak mewarisi kepada yang bukan Islam demikian pula sebaliknya.

3) Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.<sup>18</sup>

### 3. Ijma’/Ijtihad

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus tertentu.<sup>19</sup>

Jadi ijma’ harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Apabila ada di antara ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan, maka tidak dikatakan ijmak. Di samping itu, ijmak tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw. oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad dan hukum yang disepakati itu adalah hukum syarak.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 24.

<sup>19</sup> A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.73

Demikian pula halnya dengan ijihad sebagai sumber hukum Islam, adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai ululhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Ijihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah saw. atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau disepakati. Seperti masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. *Pertama*, masalah yang timbul, sementara al-Qur'an dan Sunnah ayat yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka kemungkinannya untuk ditafsirkan. *Kedua*, masalah yang timbul, tetapi tidak ada *nash*-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. *Ketiga*, masalah yang timbul, sementara sudah ada *nash qath'i*. Ijihad ini hanya pernah dijalankan Umar bin Khattab dengan alasan dan analisis tertentu.

Contoh-contoh mengenai ijihad dalam soal kewarisan misalnya, mengenai bagian warisan banci, harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya diberikan. Demikian juga ijihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit dalam soal pembagian warisan dalam kasus ahli waris terdiri dari ibu-bapak dan salah seorang dari suami isteri sudah

mati. Dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau isteri mengambil bagiannya.<sup>20</sup>

### ***C. Rukun-Rukun dan Syarat untuk Memperoleh Harta Warisan***

Rukun waris ada tiga, yang mana jika salah satu rukun waris ini tidak ada maka tidak akan terjadi pembagian warisan, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Adanya Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta dan peninggalan lainnya yang dapat diwariskan.

Pewaris adalah orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara husus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.

2. Adanya ahli waris, Yaitu seseorang atau sekelompok orang yang

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 17.

<sup>21</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2003), h. 26

berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksia, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.

3. Adanya harta warisan, Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak ada harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan dari pewaris

ditinggalkan ketika ia wafat. Harta warisan ini dapat berbagai macam bentuk dan jenisnya, seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah, kebun, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan milik pewaris yang didalamnya ada nilai materinya.

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Karena pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.

Adapun syarat-syarat waris ada tiga hal yaitu :

1. Telah meninggal pewaris baik secara nyata maupun secara hukum
2. Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia
3. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah yang bagian masing-masing.

#### ***D. Sebab-Sebab dan Halangan Memperoleh Harta Warisan***

Sebab seseorang mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) diantaranya:<sup>22</sup>

1. Karena hubungan perkawinan

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 53



Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dan si mayat.

## 2. Karena adanya hubungan darah

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.

## 3. Karena memerdekakan budak

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

## 4. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mall, dan lebih lanjut akan di gunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Halangan seseorang memperoleh harta warisan dari si mayat (ahli waris) diantaranya:

### a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan, seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak

menerima warisan dari seorang muslim. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs.

Al-Luqman /31:15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا  
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>23</sup>

#### b. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya.<sup>24</sup>

#### c. Perbudakan

Sejak budak itu tidak menjadi hak untuk mewarisi dan diwarisi. Hal ini sedikit karena dua hal yaitu:

- 1) Seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola harta benda

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h. 582.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 112

- 2) Status kekeluargaan dari kerabatnya dianggap putus karna ia sudah termasuk keluarga asing.<sup>25</sup>

Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nahl/16:75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.<sup>26</sup>

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

Ayat ke-75 diturunkan sebagai perumpamaan perbedaan nyata antara kaum Quraisy yang bebas berbuat sekehendaknya hatinya dengan hamba sahaya yang dimilikinya, yang serta terikat. Ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang kafir yang menyamakan Allah dengan berhala yang mereka sembah. (HR. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 42

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h. 374

<sup>27</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 531.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Allah membuat perumpamaan bagi dua sosok yang amat bertolak belakang, yaitu seorang mukmin yang dan kafir. Hal senada yang dikatakan Qatadah dan dikutip Ibnu Jarir Ath-Thabari. Hamba sahaya yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri karena dimiliki seorang merdeka menjadi perumpamaan bagi seorang kafir. Sedangkan orang merdeka yang dikaruniai Allah rezeki yang cukup dan ia mengeluarkan kewajibannya untuk bersedekah secara terang-terangan (diketahui orang lain) ataupun sembunyi-sembunyi merupakan perumpamaan yang Allah deskripsikan sebagai seorang mukmin. Menurut Mujahid, perumpamaan ini juga berlaku bagi kesesatan yang dibawa oleh berhala dan sesembahan-sesembahan sesat dengan kebenaran milik Allah.<sup>28</sup>

#### d. Faktor Murtad

Orang murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam. Karena ia sudah keluar maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) di antaranya individu (yang berkeluarga).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 173 membagi penghalang mewarisi menjadi 2 hal, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014), h. 549.

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.<sup>29</sup>

#### **E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain:<sup>30</sup>

##### **1. Asas Ijbari**

Secara etimologis “ijbari” mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti” terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hokum atau pernyataan kehendak dari si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya,tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi,yaitu:

- a. Dari segi peralihan harta

---

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 376.

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis,Komis Simanjutntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Cet,I (Jakarta: Sinar Grafika,1995).hal35-38

b. Dar segi jumlah harta yang beralih dan

c. Di segi kepada siapa harta itu beralih

## 2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

## 3. Asas Individual

Asas Individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

## 4. Asas Keadilan Berimbang<sup>31</sup>

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 22

Dalam sistem kewarisan Islam, Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

## **F. Ahli waris dan Bagian-Bagiannya**

### **1. Penggolongan ahli waris antara lain:**

Dalam kaitannya dengan hal ini, patrilinealisme merinci tiga macam penggolongan ahli waris yaitu:<sup>32</sup>

#### **a. Dzawil furudl (Dzawul fara-id)**

Dzawil furudl adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas dalam al-Qur'an, khususnya pada kelompok ayat kewarisan inti (QS. An-Nisa ayat 7,11,12,176.

Mereka yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam Al-Qur'an pada kelompok ayat kewarisan inti ada sebanyak delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebutkan dalam hadits Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang. Mereka itu ialah:

- 1) Anak perempuan tunggal
- 2) Ibu

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 48

- 3) Bapak
- 4) Duda
- 5) Janda
- 6) Sudara laki-laki (dalam hal kalalah)
- 7) Saudra laki-laki dan saudari bersyirkah (dalam hal kalalah)
- 8) Sudari (dalam hal kalalah)
- 9) Cucu perempuan dari putra
- 10) Kakek
- 11) Nenek
- 12) Saudari seayah.

Di antara kedua belas ahli waris tersebut, sebagian ada yang berkedudukan sebagai *dzawil furudl* dan ada yang berkedudukan bukan sebagai *dzawil furudl*. Mereka berkedudukan sebagai *dzawil furudl* antara lain ibu, duda, dan janda. Sedangkan yang kadangkala berkedudukan bukan sebagai *dzawil furudl* antara lain anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudari (perempuan).

b. Ashabah

Ahli waris ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan ashabah ini ia dapat menghabisi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.



Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashabah* ini dapat digolongkan pada tiga macam antara lain:<sup>33</sup>

1. Ashabah Nasabiyah, yaitu ia menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena hubungan darah dengan si pewaris, ashabah nasabiyah ini terbagi kepada 3 yaitu:

a. Ashabah bi nafsi,

yaitu ia menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena kedudukannya. Adapun yang menjadi ahli waris yang menjadi ashabah bi nafsi ini adalah seluruh ahli waris yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu.

b. Ashabah bil-ghairi

Yaitu menjadi ashabah karena disebabkan oleh orang lain, hal ini terjadi pada ahli waris perempuan, dimana sebelumnya dia bukan merupakan ashabah (ada bagian tertentu dalam al-qur'an dan hadist), namun dengan hadirnya ahli wari bi nafsi (laki-laki) yang sederajat dengannya, dia menjadi ashabah.

c. Ashabah ma'al ghairi<sup>34</sup>

Yaitu seorang ahli waris yang menjadi *asabah* karena bersama-sama dengan yang lain, misalnya saudara kandung atau seayah karena bersama-sama putri. Secara keseluruhan ahli waris yang termasuk *asabah* ini yaitu:

---

<sup>33</sup> Suhwardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 96.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 49

- a). anak laki-laki/putra
- b). cucu laki-laki dari putra terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki/bapak
- c). Kakek dari pihak bapak dan terus ke atas asal pertaliannya belum putus dari pihak bapak.
- d). saudara seibu
- e). Saudara seabapak
- f). Putra saudara sekandung
- g). putra sadengudara seabapak
- h). paman yang sekandung dengan bapak
- i). paman seabapak dengan bapak
- j). putra paman yang sekandung dengan bapak
- k). putra paman yang seabapak dengan bapak

Sedangkan pihak perempuan yang menjadi *ashabah* yaitu:

- l). Saudari sekandung dengan bapak
  - m).saudari seayah yang ditarik oleh saudara seayah
  - n). putri yang ditarik oleh putra
  - o). cucu perempuan yang ditarik cucu laki-laki dari putra
- kemudian ditambah lagi dengan:
- p). saudari kandung karna bersama-sama putri
  - q). saudari seayah karena sama-sama putri

c. Dzawil Arham

*Dzawil Arham* atau *dzul arham* adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Dalam patrilinealisme *dzawil Arham* ini merupakan golongan ketiga.

**2. Bagian-Bagian Ahli Waris (*Furudhul Muqaddarah*)<sup>35</sup>**

*Furudhul Muqaddarah* adalah bagian masing-masing/pendapatan ahli waris yang telah ada ketetapannya dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Kemungkinan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis ada 6 yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{3}{4}$ .

Yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis antara lain:

1. Suami, mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapat  $\frac{1}{4}$  jika si mati meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{4}$ .

2. Istri, mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suami yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapat  $\frac{1}{8}$

---

<sup>35</sup> Suwardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 105

jika si mayat meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan bagian istri adalah  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ .

3. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika si mayat tidak ada meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan) tidak lebih dari satu, dan mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ada anak (perempuan/laki-laki), cucu (perempuan/laki-laki) atau saudara lebih dari I (saudara laki-laki/saudara perempuan baik yang seibu seapak, yang seapak saja maupun seibu saja). Kemungkinan bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ .

4. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan (seterusnya ke bawah), saudara perempuan seibu seapak, saudara perempuan seapak apabila hanya I (satu) orang mendapat  $\frac{1}{2}$  dan apabila lebih dari I (satu) orang mendapat  $\frac{2}{3}$ . Selain.

5. Bapak, datuk, nenek dan I (satu) orang saudara seibu (baik yang laki-laki maupun perempuan) mendapat  $\frac{1}{6}$ .

6. Satu orang anak perempuan, jika mewarisi bersama 1 atau lebih cucu perempuan, maka anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , dan satu atau lebih cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$ . Demikian seterusnya ke bawah.

7. Satu orang saudara perempuan seibu seapak mewarisi bersama dengan 1 atau lebih saudara perempuan seapak, maka 1 (satu) saudara perempuan seibu seapak mendapat  $\frac{1}{2}$ , dan 1 atau lebih saudara perempuan seapak mendapat  $\frac{1}{6}$ .

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.<sup>1</sup>

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis data yang tepat, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>2</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dalam penelitian. Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-

---

<sup>1</sup>Widisudharta, *Metedologi Penelitian Skripsi* (Powered: by Weebly, 2009), <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> (07, desember 2015).

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai fokus.<sup>3</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis formal dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial kultur yang ada di desa tempat penelitian berlangsung.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>4</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah, warga dan tokoh masyarakat di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba.

### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>5</sup> Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

<sup>3</sup>Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 65.

<sup>4</sup>Joko P. Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 88.

<sup>55</sup> Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber adalah melihat profil informan dan kaitannya dengan penelitian. Narasumber yang memberikan informasinya di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni:

1. Muh. Salman Z. Patongai, Kepala Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut..
2. Abd. Hamid, Tokoh Agama Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Yang mempunyai peran penting di Kelurahan Ballasaraja dalam bidang keagamaan demi meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Allah swt. agar masyarakat tidak melenceng dan tetap memegang teguh ajaran Islam
3. Amiruddin, pihak yang melaksanakan pembagian warisan *ma'leang* yang mempunyai peran penting karena dia mengetahui secara pasti bagaimana warisan *ma'leang* tersebut .
4. Jamaluddin, Tokoh Masyarakat Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Yang mempunyai peran penting karena dia mengetahui tentang pembagian warisan *ma'leang*.

#### **D. Metode Pengumpulan data**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode *interview* (wawancara). Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni masyarakat yang melakukan pembagian warisan secara *ma'leleang*, Pemerintah setempat serta tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Observasi/pengamatan<sup>6</sup> di ambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan langsung kehidupan masyarakat yang melakukan pembagian warisan secara *ma'leleang* di Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba.

##### 2) Wawancara

Wawancara atau interviu terpimpin<sup>7</sup> adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan

---

<sup>6</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1014.

<sup>7</sup>Wawancara atau interviu terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84.



untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi/pengumpulan<sup>8</sup> adalah mengambil informasi melalui sebuah pendokumentasian dalam bentuk video dan gambar-gambar yang diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang melakukan praktek pembagian warisan secara *ma'leleang*.

Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.<sup>9</sup>

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
- b. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung serta foto kegiatan pada saat penelitian.

---

<sup>8</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 361.

<sup>9</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data tersebut baru bisa diolah serta disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif terkait dengan penelitian **Sistem Pembagian Harta Warisan Ma'leang (Studi Kasus di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba)**

## BAB IV

### PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MA'LELEANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang wilayah Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

#### A. *Gambaran Umum Kelurahan Ballasaraja*

##### 1. Kondisi Geografis

##### a. Letak dan Batas Kelurahan Ballasaraja

Ballasaraja merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kel. Jawi-Jawi
- 2) Sebelah Timur : Desa Bulu-Bulu
- 3) Sebelah Selatan : Desa Joggolo
- 4) Sebelah Barat : Kel. Tanete<sup>1</sup>

Wilayah kelurahan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

##### b. Luas Wilayah

Kelurahan Ballasaraja mempunyai luas wilayah 241 ha/m<sup>2</sup>

- 1). Luas Lahan Pemukiman :38,30 ha/m<sup>2</sup>
- 2). Luas lahan Sawah :328,50 ha/ m<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber Data Monografi Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

3). Luas Lahan perkebunan :266,20 ha/ m<sup>2</sup>

4). Luas Pekarangan :2,35 ha/ m<sup>2</sup>

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa di pimpin oleh Kepala Kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Kelurahan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan dan Kepala Urusan (Kaur). Adapun susunan pemerintahan Kel. Ballasaraja 2015 sebagai berikut

Tabel I  
Struktur Pemerintahan pada tahun 2015<sup>2</sup>

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Kel. Ballasaraja	Drs. Muh. Salman, Z. Patongai
2	Sekertaris Kelurahan	A. Amar
3	Ka. Ur. Pemerintahan	A. Syamsuddin, S. Pd
4	Ka. Ur. Pembangunan	Mudassir, S.SOS
5	Ka. Ur. Keuangan	A. Israwati Akil
6	Ka. Ur. Umum	M. Idris

Kel. Ballasaraja terdiri dari 812 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 2574 jiwa yang terdiri 1317 orang perempuan dan 1257 laki-laki.

---

<sup>2</sup>Format laporan profil Desa, Sumber Data Arsip Data kantor Kel. Ballasaraja, h. 22.

## 2. Kondisi sosial Budaya, keagamaan dan Ekonomi

### a. Keadaan sosial

Penduduk Kel. Ballasaraja sangat memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D3 dan SI) yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan dipondok pesantren.

Di Kel. Ballasaraja juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 3

Sarana-sarana Umum di Kel. Ballasaraja tahun 2015<sup>3</sup>

No.	Jenis sarana	Jumlah
1	Mesjid	10
2	Musholla	3
3	Taman Kanak-kanak	4
4	Sekolah Dasar	3
5	TPA	3
6	Lapangan olahraga	1

---

<sup>3</sup> Sumber data Arsip kantor Kel. Ballasaraja

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Kelurahan Ballasaraja dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

1. Peningkatan kesadaran sosial,
2. Perbaikan pelayanan sosial,
3. Bantuan sosial bagi anak yatim piatu.

b. Keadaan Budaya

Masyarakat Kelurahan Ballasaraja sebagai masyarakat ber-etnis Bugis mempunyai corak budaya seperti masyarakat Bugis pada umumnya. Budaya Masyarakat Kelurahan Ballasaraja sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kelurahan Ballasaraja sejak dahulu sampai sekarang, Adapun budaya tersebut adalah:

1. Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-barazanji, biasanya dilakukan pada saat acara pernikahan, khitanan masuk rumah baru dan hari-hari besar agama islam.
2. Yasinan, Budaya ini dilaksanakan masyarakat jika ada warga yang meminta dilakukan yasinan di rumah mereka.
3. Rebana, Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan, acara musabakah, dan hari-hari besar agama islam.
4. Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat masyarakat Kelurahan Ballasaraja mempunyai Hajat, kematian, acara tahlil

tersebut dilakukan oleh ibu-ibu dirumah Penduduk yang mempunyai hajat tersebut.<sup>4</sup>

Begitu pula dalam upacara adat yang ada di Kelurahan Ballasaraja juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa yang berdasarkan pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

Untuk mengatasi budaya yang kurang baik maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Kelurahan Ballasaraja,
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing,
- 3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Kelurahan Ballasaraja
- 4) Pembinaan bahasa nasional dan bahasa daerah.

#### c. Keadaan keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, infaq, sedekah dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, maupun dirumah penduduk.<sup>5</sup>

Kondisi Masyarakat Kel. Ballasaraja yang beragama Islam, membuat kegiatan di Kelurahan tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Salman Z. Patongai Kepala Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hamid Tokoh Agama Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015.

terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman masyarakat di Kelurahan Ballasaraja sangat tergantung pada warganya. Maka diambil langkah-langkah seperti:

1. Mengadakan pengajian rutin seminggu sekali bagi ibu-ibu.
2. Mengadakan pesantren kilat setiap bulan puasa bagi anak-anak.
3. Memberdayakan alumni pesantren.<sup>6</sup>

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat di Kelurahan Ballasaraja sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik musim penghujan maupun kemarau, sedangkan yang lainnya sebagai pedagang dan buruh bangunan.

Keadaan ekonomi Kelurahan Ballasaraja sebagian besar ditopong oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Ballasaraja ditopong oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, peternak, tukang kayu, penjahit, guru, wiraswasta, supir dan sebagainya.

Kondisi ekonomi di Kelurahan Ballasaraja bisa dikatakan cukup rendah, untuk mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Salman Z. Patongai Kepala Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015.



## 1. Bidang pertanian

Untuk meningkatkan perekonomian Kelurahan Ballasaraja pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.
- c. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna irigasi tersebut.
- d. Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait.
- e. Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2. Bidang industri

Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kel. Ballasaraja pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.

- b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan keranjang, bakul dan hiasan lainnya.<sup>7</sup>

## **B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan *Ma'leleang* Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Warisan *Ma'leleang***

Warisan *Ma'leleang* adalah pembagian harta warisan yang dilakukan dalam satu rumpung keluarga secara bergiliran.<sup>8</sup> Karena ahli warisnya lebih dari satu orang maka untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang lain maka jalan satu-satunya yang dilakukan adalah dengan cara bergilir dalam membagi warisan.

Adapun ahli waris yang dapat mengambil manfaat dari warisan *ma'leleang* Adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, diantaranya:

- a. Anak laki-laki
- b. Anak perempuan
- c. Cucu laki-laki
- d. Cucu perempuan
- e. Cicit laki-laki
- f. Cicit perempuan dan seterusnya.

Masyarakat bugis khususnya di Kelurahan Ballasaraja melakukan pembagian warisan *ma'leleang* untuk mencari jalan keluar dari persoalan warisan yang terjadi

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak A. Amar Sekretaris Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Tokoh Masyarakat Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015

dalam satu rumpung keluarga dengan jalan musyawarah untuk mencari keadilan. *Mae'leleang* merupakan kegiatan yang dilakukan sejak dari nenek moyang yang telah menjadi kebiasaan sebagian orang di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lahan tanah terbatas yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak memperolehnya. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Agama Islam sebagai agama samawi yang bersumber dari Allah swt, mengandung ajaran yang sangat luas dengan 3 (tiga) komponen utama yaitu aqidah, syariah dan akhlaq. Ketiga komponen itu berkaitan sangat erat dan merupakan suatu totalitas yang bertumpu pada Tauhid sebagai fondasi dalam struktur agama Islam. Ketiga komponen tersebut mencakup dua macam hubungan interrelasi yaitu hablun minallah (hubungan antara manusia dengan Allah swt) dan hablun minannas (hubungan manusia dengan sesama manusia). Kedua macam hubungan itu diwujudkan dalam bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah swt, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah swt. Agama Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek ubudiyah murni (ibadah), tetapi juga mengatur aspek-aspek kemasyarakatan (muamalah).

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>9</sup>

Sebagaimana Firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah /2:180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.<sup>10</sup>

Penguasaan tanah waris *ma'leang* yang terdapat dalam masyarakat Ballasaraja yang diwariskan pada sekumpulan ahli waris, harta tersebut tidak boleh dibagi diantara mereka untuk dimiliki sepenuhnya, tetapi hanya dibagikan/digilirkan pemakaiannya diantara ahli waris. Harta tersebut tetap dalam status waris milik bersama (kolektif), hanya memiliki hak pakai atas bagian harta waris tersebut. Pada satu sisi bisa bersifat individual, disisi lain bisa pula bersifat kolektif. Penguasaan tanah melalui sistem waris *ma'leang* merupakan salah satu bentuk dari cara pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Ballasataja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Pemegang hak waris *ma'leang* ini bisa saja ditetapkan tidak sesuai dengan urutan dan dialihkan kepada saudara perempuan

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 375.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h. 34.

lainnya dengan alasan yang kuat. Biasanya yang dijadikan alasan adalah untuk membantu saudara perempuan yang benar-benar miskin.

Tabel 3

Data waris *ma'leleang*<sup>11</sup>

No	Nama pihak yang melakukan pembagian warisan <i>ma'leleang</i>	Objek warisan <i>ma'leleang</i>
1	Hastati	Tanah sawah
2	Hasni	Tanah sawah
3	Rosmina	Tanah sawah
4	Banong	Tanah sawah
5	Gaddong	Tanah sawah
6	Hase	Tanah sawah
7	Muhtar	Tanah sawah
8	Amiruddin	Tanah sawah

## 2. Proses Terjadinya Warisan *Ma'leleang*

Semua manusia pasti mendapatkan yang namanya kematian, sehingga dengan meninggalnya pewaris maka harta yang dimiliki pewaris akan turun kepada ahli warisnya yang berhak. Proses terjadinya akad warisan *ma'leleang* dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi saling percaya diantara mereka.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pemerintah setempat, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan pembagian warisan *ma'leleang*

Hak warisan *ma'leleang* biasanya diteruskan setiap selesai musim panen dalam suatu musyawarah kerabat (keluarga). Dalam musyawarah keluarga ini diundang para kerabat (saudara laki-laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem warisan *Ma'leleang* tersebut. Pelaksanaan musyawarah keluarga untuk menetapkan warisan *ma'leleang* dilakukan sebagai berikut :

- a. musyawarah dilakukan sesudah panen pada rumah salah seorang ahli waris, biasanya ahli waris pemegang warisan *ma'leleang*, namun boleh juga di rumah ahli waris yang lain.
- b. Musyawarah dimulai dengan pengarahan, nasehat, dan bimbingan dari sanak keluarga yang dituakan di dalam anggota keluarga tersebut
- d. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kerabat yang hadir untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan warisan *ma'leleang* sebelumnya dan saran perbaikan bagi penanganan waris *ma'leleang* berikutnya.
- e. Setelah mendengar pendapat dan saran dari kerabat, maka akan disebutkan pemegang hak warisan *ma'leleang* atau hak pakai atas tanah tersebut secara resmi dihadapan kerabat yang hadir. Bila diperoleh kata mufakat diantara kerabat dan saudara perempuan yang seharusnya sebagai pemegang hak waris *ma'leleang* menyetujui, maka hal ini dapat dibenarkan. Namun pada putaran *ma'leleang* (bergiliran) berikutnya hak waris *ma'leleang* tersebut diserahkan kembali kepadanya.

Disamping itu perputaran warisan *ma'leang* modusnya ada yang dilakukan menurut urutan saudara, dari yang tertua sampai kepada yang bungsu.

### 3. Pemanfaatan Tanah Warisan *Ma'leang*

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemanfaatan tanah warisan *ma'leang* di dalam masyarakat bugis di Kelurahan Ballasaraja dilakukan oleh masing-masing ahli waris dalam satu rumpung keluarga tersebut. Pemanfaatan tanah wari *ma'leang* yang dilakukan beraneka ragam sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah.

Pemanfaatan tanah waris *ma'leang* dikelola atau digarap oleh ahli waris sendiri dan hasil yang di peroleh dari tanah warisan tersebut di ambil oleh ahli waris yang berhak. Tanah tersebut tidak dapat di perjual belikan kepada siapapun tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.

Islam sangat mengkonfirmasi pentingnya harta seseorang yang nantinya sepeninggal pewaris selayaknya dapat di manfaatkan bagi anak-anaknya sebagai ahli waris.<sup>12</sup> Sebagaimana Firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa /4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 94.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, hasil dari pemanfaatan tanah warisan *ma'leang* dapat merugikan salah satu pihak di karenakan terkadang gagal panen. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah warisan *ma'leang* yang terjadi di masyarakat bugis di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba harus ditinjau ulang karena merugikan bagi salah satu pihak dikarenakan hasil yang diperoleh tidak sama. Demikianlah penelitian terhadap pemanfaatan tanah waris *ma'leang* dalam masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

### **C. Faktor-Faktor dalam Pelaksanaan Waris Ma'leang**

Terjadinya waris *ma'leang* disebabkan karena faktor terbatasnya lahan yang dimiliki oleh pewaris sebelum meninggal dunia, dan karena adanya musyawarah mufakat sehingga waris *ma'leang* dapat dilaksanakan. Jika di dalam satu rumpung keluarga tersebut setelah dilakukan musyawarah dan tidak ada kesepakatan maka waris *ma'leang* tidak dapat dilaksanakan. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h. 101.



kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>14</sup>

Namun terkadang hanya dengan sistem hukum yang baik belum cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Sebuah sistem hukum atau sebuah peraturan baru akan berfungsi dalam menjamin ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat apabila negara memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan suatu hukum. Sehingga sebuah negara dapat mengawasi, mengurus serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian juga dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, karena jika hukum kewarisan Islam dilaksanakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat. Hal itu jelas tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan, mencegah kemafsadatan dan kerusakan bagi umat manusia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam. membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap hukum Islam, maka dibuatlah perangkat undang-undang dalam bentuk Instruksi

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 379.

Presiden (Inpres) Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan perangkat hukum yang secara formal dan materiil memberikan landasan yuridis mengenai pelaksanaan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam. Adapun materi dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut berasal dari kumpulan khazanah fiqh atau kumpulan hukum Islam yang tersebar dari kitab-kitab fiqh, ada juga diantaranya adalah materi-materi yang merupakan penyesuaian dari kondisi sosial kultural di Indonesia. Meskipun demikian materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak keluar dari tujuan hukum Islam. Dengan diangkatnya hukum kewarisan Islam menjadi salah satu perundangan nasional di Indonesia, berarti hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Dengan diberlakukannya hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus patuh pada hukum yang berlaku dan wajib tunduk pada segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setiap tindakan warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun segala tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang ada akan dianggap sebagai bentuk dari perbuatan melanggar hukum. Dalam setiap pelanggaran hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara dan

keberatan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum terhadap apa yang menjadi haknya.

#### **D. Nilai-Nilai dalam Pelaksanaan Warisan *Ma'lelang***

Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan *ma'lelang* yaitu tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya terpuruk, dan tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya dengan cara membagikan warisan secara adil.<sup>15</sup>

Muslim yang lahir dalam posisi dan sistem kekeluargaan yang berlainan akan mempunyai prospek hidup yang berlainan dan mempunyai perbedaan dalam mengartikan keadilan, khususnya dalam bidang kewarisan. Seseorang yang lahir dalam sistem patrilineal akan mengartikan keadilan dalam kewarisan itu ada, jika garis keturunan dihubungkan laki-laki/bapak. Sedangkan orang yang lahir ditengah-tengah sistem kekeluargaan matrilineal akan berprinsip sebaliknya, adil dalam kewarisan itu ada jika garis keturunan dihubungkan dengan perempuan/ibu.<sup>16</sup> Dalam ketidaksamaan yang ada terdapat satu persamaan mendasar, yaitu persamaan akidah dan persamaan pegangan pokok penentuan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Persoalannya kemudian menjadi bagaimana memformulasikan Al-Qur'an dan Hadist di tengah-tengah perbedaan yang ada. Artinya perbedaan prinsip keadilan bukan sesuatu yang dikehendaki Al-Qur'an dan Hadis berhubungan dengan kewarisan Islam. Hadist Rasulullah saw. diantaranya:

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Tokoh Masyarakat Kelurahan Ballasaraja Bulukumpa pada tanggal 14 desember 2015

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 96.

قَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ فَايِلْنَا كَلَّا تَرَكَ وَمَنْ ة فَلِلْوَرَث مَالًا  
مَالًا تَرَكَ مَنْ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi, bahwa beliau bersabda: barang siapa mati dengan meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli warisnya, dan barang siapa mati dengan meninggalkan keluarga yang butuh santunan, maka akulah yang menjadi penaggunnya.” (HR. Muslim).

Mengenai pembagian waris, termasuk dalam hukum yang bersifat *dharuriyat*, *dharuriyat* ialah mewujudkan kemashlahatan manusia (kebutuhan pokok).<sup>17</sup> Hal-hal yang menjadi dharuri bagi manusia yaitu, agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan.

Kelemahan menjalankan sistem warisan *ma'leleang* diantaranya:

1. Hasil yang diperoleh dari warisan *ma'leleang* tersebut tidak sama
2. Dapat membuka peluang kepada masing-masing ahli waris untuk bertikai karena adanya saling iri hati ketika ahli waris yang lainnya pada saat memperoleh hasil dari warisan *ma'leleang* tersebut lebih banyak dari ahli waris yang lain.
3. Yang dapat diambil dari warisan *ma'leleang* hanya manfaatnya saja karena tanah tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 310

Pembagian harta warisan yang tidak disepakati oleh sebagian Ahli waris dapat dilakukan dengan jalan musyawarah para ahli waris untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara masing-masing ahli waris dengan jalan damai. Adapun cara penyelesaiannya ketika sebagian ahli waris tidak mau melakukan pembagian harta warisan *ma'leleang* adalah dengan cara sesuai dengan Al-Qur'an surah An-nisa ayat 7,11,12,176. Apabila ahli waris yang lain yang ingin melakukan pembagian warisan *ma'leleang* dilakukan ketika sudah dibagi warisan tersebut sesuai dengan yang termuat dalam al-Qur'an. Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta warisan *ma'leang* yang terjadi di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu hanya manfaatnya saja yang di ambil oleh masing-masing ahli waris dan tidak dimiliki sepenuhnya. Misalnya, si A melakukan penggarapan tanah waris selama 2 kali garap dalam setahun dan telah memanen hasil garapannya, dan begitupun dengan si B tahun berikutnya melakukan penggarapan 2 kali dalam setahun. Setelah semua ahli waris telah mendapat giliran (*ma'leang*) maka kembali ke asal lagi yang paling utama mendapatkan giliran, maka si B berhak menyerahkan tanah tersebut kepada si A untuk di ambil hasilnya, agar tidak merugikan pihak lain dan merasakan adanya keadilan dalam waris *ma'leang* tersebut.
2. Pembagian harta warisan *ma'leang* di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam pembagian tersebut ada unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

### **B. Implikasi Penelitian**

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah ada pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara pembagian harta warisan secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada ahli waris yang melaksanakan pembagian harta warisan *ma'leang* hendaklah mendatangkan saksi dalam hal ini pemerintah setempat agar di kemudian hari apabila terjadi perselisihan dapat menggunakan catatan yang ditandatangani oleh masing-masing ahli waris sebagai bukti otentik jika diantara ahli waris tersebut terjadi perselisihan.
3. Hendaklah masing-masing ahli waris *ma'leang* menyadari hak-haknya sebagai ahli waris agar terjadi keharmonisan dalam keluarga.
4. Kepada masyarakat secara umum, penduduk di Kelurahan Ballasaraja, secara khusus agar memperhatikan aturan-aturan syariat Islam dalam pembagian harta warisan khususnya waris *ma'leang* agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada (nash).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 SamataSungguminasa – GowaTlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2015

Gowa, 03 November 2015

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada :

**Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel  
Di**

**Makassar**

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Arni  
Nim : 10100112078  
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama  
Semester : (VII) Tujuh  
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**“Sistem Pembagian Warisan Ma’leang (Studi Kasus di Kel. Ballasaraja, kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa)”**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Dra. Hartini Tahir, M.HI.  
2. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kel. Ballasaraja, kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa, terhitung mulai tanggal 09 November 2015 s.d 09 Januari 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

**A.n. Rektor,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,**

**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003**

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ali, Ahmad. dkk. *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)*. Cet. I; Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014.

Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).

Daud, Ma'mur. *Terjemahan Hadits Sahih Muslim*, Jilid. 3 (Cet. III; Jakarta: Widjaya, 1993).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012).

Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Format laporan profil Desa, Sumber Data Arsip Data kantor Kel. Ballasaraja.

Hamidy, H. Zainuddin. *Terjemahan Hadits Sahih Bukhari*, Jilid. 4 (Cet. V; Jakarta: Widjaya, 1992).

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).

Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2003).

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).

P. Subagyo, Joko. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, ( Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Simanjuntak, Komis dan Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika.1999).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010) .

Sumber data Arsip kantor Kel. Ballasaraja.

Sumber Data Monografi Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Widisudharta, *Metedologi Penelitian Skripsi* (Powered: by Weebly, 2009), <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> (07, desember 2015).

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





## PEDOMAN WAWANCARA

➤ Pemerintah Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba

1. Apakah pemerintah Kelurahan mengetahui apabila masyarakat melakukan Pembagian Harta Warisan secara *Ma'leleang*?
2. Apakah pihak pemerintah kelurahan diundang untuk menyaksikan terjadinya pembagian warisan *Ma'leleang*?
3. Bagaimana akad pelaksanaan pembagian harta warisan *Ma'leleang*?
4. Apabila terjadi sengketa warisan *ma'leleang*, apakah pihak pemerintah kelurahan dilibatkan?
5. Bagaimana tingkat pendidikan warga di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?

➤ Tokoh masyarakat Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba

1. Apakah yang menjadi alasan sehingga masyarakat melakukan pembagian warisan *ma'leleang*?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan *ma'leleang*?
3. Bagaimana bentuk akad pembagian warisan *ma'leleang* di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?
4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan warisan *ma'leleang* di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?
5. Apakah pihak yang melakukan Pembagian warisan *ma'leleang* menghadirkan saksi?
6. Apakah tindakan Bapak/Ibu jika salah satu pihak yang melakukan pembagian warisan *ma'leleang* melanggar waktu yang telah disepakati?



7. Bagaimana kedudukan harta warisan *ma'leleang* tersebut?
8. Bagaimana sistem pembagian warisan *ma'leleang* di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?
9. Sejak kapan Pembagian warisan *ma'leleang* ini mulai dilakukan?
10. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Kel. Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MA’LELEANG (studi kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa) ”** bernama lengkap ARNI, Nim : 10100112078, putri tunggal dari 4 bersaudara lahir dari pasangan Bapak Mustaming dan Ibu Geno yang lahir pada tanggal 02 Januari 1994 di Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 74 Tamarellang Kelurahan Ballasaraja kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa pada tahun 2000 sampai 2006, pada tahun 2006 sampai 2009 penulis menempuh pendidikan di MTsN 410 TANETE BULUKUMPA, di tahun 2009 sampai 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di MADRASAH ALIYAH NEGERI TANETE. Hingga pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2016.

Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis juga aktif di beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa jurusan (HMJ) Peradilan Agama Periode 2013-2014, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya, Organisasi daerah (ORGANDA), Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri Tanete Bulukumpa (IKAMANTA).